

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Masalah kependudukan merupakan salah satu permasalahan dunia. Worldmeters mencatat jumlah penduduk dunia pada tahun 2021 mencapai 7,8 miliar jiwa. Angka tersebut meningkat 1,08% dari tahun 2020 yang sebesar 7,7 miliar jiwa. Indonesia merupakan negara urutan ke-4 penduduk terbanyak di dunia setelah Amerika Serikat dengan jumlah penduduk sebesar 278 juta jiwa. Selama sepuluh tahun berturut-turut Indonesia menjadi negara dengan jumlah penduduk terbanyak di ASEAN.<sup>1</sup>

Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk yang besar tidak terlepas dari permasalahan tingginya pertumbuhan penduduk. Menghadapi permasalahan tersebut Pemerintah melakukan langkah antisipasi ledakan penduduk dengan menawarkan Program Keluarga Berencana (KB) untuk meningkatkan kesejahteraan ibu dan bayi serta mewujudkan keluarga yang sejahtera melalui mengatur kehamilan bagi pasangan usia subur.<sup>2</sup>

Program KB juga dimaksudkan untuk menekankan angka kematian ibu akibat '4 terlalu', yaitu terlalu muda, terlalu sering, terlalu banyak, terlalu tua. Masalah Kesehatan ibu dan bayi juga perlu di perhatikan. Kesehatan ibu dan bayi merupakan cerminan pembangunan Kesehatan suatu negara, yang salah satu indikator utamanya adalah Angka kematian ibu (AKI) Penurunan angka kematian ibu merupakan salah satu target dari Sustainable Development Goals (SDGs)<sup>3</sup>

Badan kependudukan dan keluarga berencana nasional memiliki peran strategis khususnya dalam pembangunan manusia dan masyarakat, bertujuan untuk meningkatkan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia melalui peningkatan kecerdasan otak dan kebugaran jasmani melalui peningkatan pendidikan, kesehatan dan gizi. Diamiatkan oleh Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Pembangunan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, kependudukan sebagai modal dasar dan faktor dominan pembangunan harus menjadi titik sentral pembangunan berkelanjutan.<sup>4</sup>

Tingginya *unmet need* pelayanan KB yakni 8,5% dari jumlah pasangan usia subur (PUS), baik untuk membatasi kelahiran (4,6%) maupun menjarangkan kelahiran (3,9%) berpotensi besar untuk terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan, oleh sebab itu dalam upaya meningkatkan kesehatan ibu, sasaran utama program KB adalah kelompok *unmet need* dan ibu pasca persalinan merupakan sasaran yang sangat penting.<sup>5</sup>

Kebijakan yang mengatur tentang pelayanan KB pasca persalinan Peraturan Kepala badan kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Nomor 24 tahun 2017 tentang pelayanan Keluarga berencana pasca persalinan adalah pelayanan KB yang diberikan setelah persalinan sampai dengan 42 hari. KB pasca persalinan merupakan suatu upaya strategis dalam penurunan AKI dan juga AKB dan sekaligus penurunan TFR.<sup>5</sup>

Program Kesehatan masyarakat pelayanan KB Pasca Persalinan memegang peranan yang sangat penting, khususnya dalam membantu keluarga menciptakan jarak yang ideal antar kehamilan. Dengan pengaturan jarak antar kehamilan yang baik, ibu akan mempunyai waktu yang cukup untuk memulihkan kesehatannya setelah hamil dan melahirkan. Bayi juga memiliki kesempatan yang baik untuk mendapatkan ASI eksklusif pada enam bulan pertama, meneruskan ASI hingga dua tahun Bersama dengan pemberian makanan pendamping ASI, serta tumbuh dan berkembang secara optimal.<sup>6</sup>

Kementerian Kesehatan telah menjabarkannya dalam Rencana Strategi (Renstra) Kementerian Kesehatan tahun 2020 - 2024, dengan menetapkan penurunan angka kematian ibu sebagai major project, yang harus digarap dengan langkah-langkah strategis, efektif dan efisien. Salah satu indikator pencapaian sasaran kegiatan tersebut untuk meningkatnya akses dan kualitas upaya menyelenggarakan pelayanan kesehatan usia reproduksi yaitu kabupaten/kota yang mempunyai minimal 50% puskesmas memberikan pelayanan kesehatan reproduksi calon pengantin (kespro catin) dan seluruh puskesmas mampu dan memberikan pelayanan KB pasca persalinan. Targetnya sebanyak 514 kabupaten/kota pada tahun 2024.<sup>7</sup>

Setelah berbagai usaha yang dilakukan oleh pemerintah dan tenaga Kesehatan, akan tetapi pelayanan kb pasca persalinan ini masih belum baik yang dibuktikan dengan rendahnya angka cakupan KB pasca persalinan. Cakupan pelayanan KB pasca persalinan di Indonesia tahun 2022 sebesar 15,8% sehingga masih ada 85% ibu bersalin belum menggunakan KB pasca persalinan.

Data profil Dinas Kesehatan Provinsi pada tahun 2021, di Sumatra Barat ditemukan kasus kematian ibu berjumlah 193 orang. Adapun rincian kematian ibu ini terdiri dari kematian ibu hamil sebanyak 28,8%, kematian ibu bersalin 70,2% dan ibu kematian ibu nifas sebanyak 22,5%.<sup>8</sup>

Rincian kematian di kota Padang tahun 2022, ditemukan kasus kematian ibu sebanyak 17 kasus, jumlah ini menurun jika dibandingkan dengan tahun 2021 yang berjumlah 30 orang. Adapun rincian kematian ibu hamil sebanyak 8 orang, kematian ibu bersalin 1 orang dan kematian ibu nifas sebanyak 8 orang. Sementara jika dilihat berdasarkan umur, kematian ibu umur 20-34 tahun sebanyak 13 orang dan diatas 35 tahun sebanyak 4 orang. Trend kasus kematian ibu di Kota Padang 5 tahun terakhir bervariasi, secara umum mengalami naik turun. Adapun trend kasus kematian ibu di Kota Padang terakhir yaitu tahun 2018 sebanyak yaitu 17 orang, tahun 2019 sebanyak 16 orang, tahun 2020 sebanyak 21 orang, tahun 2021 sebanyak 30 orang.<sup>9</sup> Mengatasi masalah kematian ibu, salah satu strateginya adalah pelayanan KB Pasca Persalinan.<sup>10</sup>

Saat ini capaian target pelayanan KB Pasca Persalinan masih belum sesuai target yang ditetapkan. Berdasarkan laporan Dinas Kesehatan kota Padang tahun 2022 mengenai cakupan dan proporsi peserta KB Pasca Persalinan menurut jenis kontrasepsi di Puskesmas se-Kota Padang. Puskesmas di Kota Padang berjumlah 23 Puskesmas yaitu tersebar di 11 kecamatan se-Kota Padang, penggunaan kontrasepsi Pasca Persalinan hanya 7586 orang. Adapun rincian penggunaan metode kontrasepsi Pasca Persalinan berdasarkan jenis kontrasepsi yaitu kondom sebanyak 1007 orang (13%), suntik sebanyak 3682 (48,5%), pil sebanyak 1526 orang (20,1%), IUD sebanyak 657 orang (8,7%), MOW sebanyak 192 orang (2,5%), MOP tidak ada (0%) dan implant sebanyak 522 orang (6,9%).<sup>9</sup>

Puskesmas Padang Pasir merupakan salah satu puskesmas yang ada di Kota Padang yang aktif dalam mengikuti kelas ibu hamil, tetapi masih kurangnya pengetahuan ibu hamil mengenai KB Pasca Persalinan. Laporan Puskesmas Padang Pasir 2022 terkait proporsi peserta KB Pasca Persalinan menurut jenis kontrasepsi, Puskesmas Padang pasir dengan jumlah ibu bersalin/nifas sebanyak 475 orang.

Salah satu materi kelas ibu hamil yang dibahas adalah tentang KB pasca persalinan dalam 4 kali pertemuan, minimal satu kali pertemuan ibu hamil didampingi oleh suami atau keluarganya. Hal ini dimaksudkan agar kesehatan ibu selama hamil, bersalin dan nifas termasuk kesehatan bayi yang baru dilahirkan dan kebutuhan akan KB pasca persalinan menjadi perhatian dan tanggung jawab seluruh keluarga.<sup>5</sup>

Pentingnya kualitas penyuluhan masalah kontrasepsi oleh setiap tenaga kesehatan. Karena masih banyak ibu hamil, belum paham kontrasepsi apa yang digunakan pasca melahirkan, mereka sangat kurang mendapatkan informasi tentang kontrasepsi, sehingga dengan adanya konseling sejak dini, para ibu hamil telah diberikan pengetahuan tentang alat kontrasepsi yang digunakan atau dipilih kelak setelah melahirkan anak.<sup>11</sup>

Pemakaian alat kontrasepsi pasca salin saat ini dirasakan belum sesuai dengan harapan. Salah satu faktor yang menyebabkan hal ini adalah tingkat pengetahuan masyarakat yang masih rendah mengenai alat kontrasepsi pasca salin. Menurut peneliti, penyuluhan mengenai Alat kontrasepsi perlu digalakan di berbagai fasilitas Kesehatan. Selain itu, hasil penyuluhan perlu ditinjau agar dapat dilihat pengaruhnya terhadap tingkat pengetahuan dan sikap. Hal inilah yang membuat peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang pemberian penyuluhan mengenai Alat Kontrasepsi pasca salin terhadap tingkat pengetahuan dan sikap.

Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan di Puskesmas Padang Pasir dengan mewawancarai ibu hamil, terdapat 4 ibu hamil (40%) yang berminat menjadi akseptor KB pasca persalinan dan dari 10 ibu hamil tersebut, terdapat 5 ibu hamil (50%) yang mengetahui tentang KB pasca persalinan.

Hasil wawancara saat survey awal pada kelas ibu hamil di puskesmas padang pasir, ditemukan 7 orang ibu hamil yang belum mempunyai rencana kehamilan keluarga berencana, 3 orang lagi menyatakan akan memakai kontrasepsi yang sama. Berdasarkan data tersebut saya tertarik meneliti tentang, "Perbedaan tingkat pengetahuan dan sikap ibu hamil sebelum dan sesudah pemberian penyuluhan Alat kontrasepsi pasca salin di wilayah kerja Puskesmas Padang Pasir".

## **1.2 Rumusan Masalah**

Apakah ada perbedaan tingkat pengetahuan dan sikap ibu hamil sebelum dan sesudah pemberian penyuluhan kontrasepsi pasca salin di wilayah kerja Puskesmas Padang Pasir?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Umum**

Penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan tingkat pengetahuan dan sikap ibu hamil sebelum dan sesudah penyuluhan kontrasepsi pasca salin di wilayah kerja Puskesmas Padang Pasir.

### **1.3.2 Tujuan Khusus**

Untuk diketahui distribusi frekuensi tingkat pengetahuan ibu hamil sebelum diberikan penyuluhan kontrasepsi pasca salin

- 1) Untuk diketahui rata-rata tingkat pengetahuan ibu hamil sebelum diberikan penyuluhan kontrasepsi pasca persalinan.
- 2) Untuk diketahui perbedaan pengetahuan sebelum dan sesudah diberikan penyuluhan kontrasepsi pasca persalinan.
- 3) Untuk diketahui rata-rata tingkat sikap ibu hamil sebelum diberikan penyuluhan kontrasepsi pasca persalinan.
- 4) Untuk diketahui perbedaan sikap sebelum dan sesudah ibu hamil sesudah diberikan penyuluhan kontrasepsi pasca persalinan.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Manfaat Bagi Peneliti**

Hasil penelitian ini menjadi pengalaman dan menerapkan ilmu bagi sipeneliti.

#### **1.4.2 Manfaat Bagi Instasi Pendidikan**

Menjadi salah satu sumber bacaan, referensi dan sumber kepustakaan tentang kontrasepsi pascalin.

#### **1.4.3 Manfaat Bagi Masyarakat**

Hasil penelitian ini juga dapat menjadi bahan informasi dan masukan bagi masyarakat mengenai kontrasepsi pasca persalinan.

